

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Implementasi Pembuatan Akta Perjanjian Praperkawinan dan Pasca perkawinan oleh Notaris*. Bandung: Refika, 2022.
- Adjie, Habib. *Kebatalan Dan Pembuatan Akta*. Bandung: Rafika Aditama, 2013.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Irianto, Sulistyowati, & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Keempat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Prajitno, Andi A.A. *Kewenangan Notaris Dan Contoh Bentuk Akta*. Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2018.
- Saputro, Anke Dwi. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. 21st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Tihami, & Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*.
- Warsito, Herman. *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 69?PUU-XIII/2015

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
 Jabatan Notaris.
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang
 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang
 Jabatan Notaris Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
 tentang Hak Pengelolaan, Hak

B. SURAT EDARAN

- Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kementerian Dalam Negeri, Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL.
 Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian
 Agama, Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017.

C. INTERNET

- <https://unair.ac.id/pentingnya-perjanjian-pisah-harta-di-mata-hukum>
 Auli, R. C. (2023). Pasal 1337 KUH Perdata sebagai Pembatasan Kebebasan
 Berkontrak.
 Rully Desthian Pahlepi (2022). Notaris Adalah:Tugas, Contoh, Beserta Biayanya.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-cl1996>
[https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-](https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian)
[sah-perjanjian](https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian) [https://misaelandpartners.com/perjanjian-](https://misaelandpartners.com/perjanjian-perkawinan-di-indonesia/)
[perkawinan-di-indonesia/](https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian)
[https://www.blibli.com/friends/blog/ayat-alquran-tentang-](https://www.blibli.com/friends/blog/ayat-alquran-tentang-pernikahan-20/)
[pernikahan-20/](https://www.blibli.com/friends/blog/ayat-alquran-tentang-pernikahan-20/)

D. JURNAL DAN TESIS

- Asyatama, F., & Ridwan, F. H. (2021). Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 109-122.
 Banakar, Reza, & Max Travers. "Law, Sociology and Method" dalam *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, 2005.
 Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).

- Jalil, S. M. A. (2024). Akta Perjanjian Kawin Terhadap Kepemilikan Harta Perkawinan. *Lakidende Law Review*, 3(2), 630-637.
- Monika, R., & Rahayu, M. I. F. (2022). Keabsahan Hukum Akta Pisah Harta Dalam Perkawinan Setelah Perkawinan Dilangsungkan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 14944-14954.
- Muda, I. (2023). Follow-up of Law-Making State Institutions to the Legal Message of the Constitutional Court Decision: Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk UndangUndang terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 19-35.
- Pangemanan, A. B. (2016). Kewajiban Notaris Sebagai Pejabat Umum Yang Berwenang Untuk Membuat Akta Autentik. *LEX ADMINISTRATUM*, 4(2).
- Putri, Nabila Mazaya, and Henny Marlyna. "Kewajiban Bagi Notaris Dan PPAT Yang Merangkap Jabatan Untuk Memiliki Wilayah Kedudukan Dalam Satu Wilayah Kerja Yang Sama." *Palar | Pakuan Law Review* 7, no. 2 (2021): 409–24. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4298>.
- Ratnawaty, L. (2021). Aspek Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Kota Bogor. *YUSTISI*, 8(1), 1-14.
- Rizal, M. Yose. "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (2019): 81–96.
- Tuwaitan, Rossel Ezra Johannes. "Kewenangan Notaris Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Lex Privatum VI*, no. 6 (2018): 87.